

Analisis *Triple Helix* dalam Kawasan Ekonomi Khusus (Studi Kasus: KEK Sei Mangkei)

Triple Helix Analysis in Special Economic Zone (Case Study: Sei Mangkei SEZ)

Tatang Suheri¹, Selfa Septiani Aulia²

¹ Program Studi Sarjana Perencanaan Wilayah dan Kota, Universitas Komputer Indonesia, Bandung, Jawa Barat 40132

² Program Studi Sarjana Perencanaan Wilayah dan Kota, Universitas Komputer Indonesia, Bandung, Jawa Barat 40132

Email : tatangsuheri@unikom.ac.id

Abstrak – Salah satu cara untuk mempercepat perkembangan ekonomi pada sebuah wilayah di Indonesia adalah dengan mengembangkan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). Akan tetapi KEK yang ada saat ini masih memiliki permasalahan dalam pengembangannya. KEK saat ini tidak hanya bersaing dengan kawasan lain di dalam negeri. Saat ini KEK bersaing dengan kawasan ekonomi global lainnya, sehingga diperlukan cara-cara untuk meningkatkan daya saing sebuah wilayah pada KEK tersebut. Konsep daya saing wilayah saat ini didefinisikan dengan kemampuan sebuah wilayah untuk dapat berinovasi dalam menghadapi tantangan global. Kemampuan berinovasi menjadi kunci keberhasilan sebuah wilayah agar dapat lebih maju dengan wilayah lainnya. Sistem inovasi akan terbentuk apabila terdapat penguatan jejaring antar aktor yang berkolaborasi untuk melakukan kegiatan usaha secara bersama di sebuah wilayah. Konsep *triple helix* merupakan salah satu pendekatan penguatan jejaring antar aktor yang melibatkan interaksi antara pemerintah, intelektual dan pelaku usaha di sebuah wilayah. Penelitian ini menjadi penting karena jaranganya penelitian yang mengaitkan konsep *triple helix* di sebuah KEK.

Kata kunci : *Triple Helix Analysis*, Kawasan Ekonomi Khusus, Daya Saing Wilayah

Abstract – *One ways to accelerate economic development in a region in Indonesia is to develop a Special Economic Zone (SEZ). However, the existing SEZ still has problems in its development. SEZ currently not only competes with other regions in the country. Currently, SEZ competes with other global economic regions, so it needs ways to improve the competitiveness of a region in the SEZ. The concept of regional competitiveness currently is defined with the ability of a region to be able to innovate in the face of global challenges. The ability to innovate is the key to the success of a region in order to be more advanced with other areas. An innovation system will be established if there is network strengthening between actors collaborating to conduct joint business activities in a region. The triple helix concept is one approach to network strengthening among actors involving interaction between government, intellectuals and business actors in a region. This research is important because of the rarity of research that links the concept of triple helix in a SEZ.*

Keyword : *Triple Helix Analysis, Special Economic Zone, Regional Competitiveness*

I. PENDAHULUAN

Kawasan Ekonomi Khusus atau KEK merupakan salah satu kawasan strategis skala nasional yang bertujuan untuk mengurangi kesenjangan pembangunan antara wilayah Barat dan Timur Indonesia. Berdasarkan RPJMN 2015-2019, KEK diarahkan sebagai pusat pertumbuhan berbasis sumber daya alam dan kegiatan budidaya unggulan sebagai “penggerak utama pengembangan wilayah”. Pada UU No. 39 Tahun 2009 tentang KEK, pengembangan KEK bertujuan untuk mempercepat perkembangan daerah dan sebagai model terobosan pengembangan kawasan untuk pertumbuhan ekonomi, antara lain industri, pariwisata, dan perdagangan sehingga dapat menciptakan lapangan pekerjaan. KEK didefinisikan sebagai kawasan dengan batas tertentu dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang ditetapkan untuk menyelenggarakan fungsi perekonomian dan memperoleh fasilitas tertentu. Oleh

karena itu, KEK sebagai kawasan strategis skala nasional dalam RPJMN 2015-2019 diarahkan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi wilayah yang memaksimalkan keuntungan aglomerasi dan terletak pada posisi strategis serta mendapat dukungan dari pemerintah, baik pemprov maupun pemkab/ pemkot.

Fungsi KEK adalah untuk melakukan dan mengembangkan usaha di bidang perdagangan, jasa, industri, pertambangan dan energi, transportasi, maritim dan perikanan, pos dan telekomunikasi, pariwisata, dan bidang lain. Sesuai dengan hal tersebut, KEK terdiri atas satu atau beberapa zona, antara lain zona pengolahan ekspor, logistik, industri, pengembangan teknologi, pariwisata, dan energi yang kegiatannya dapat ditujukan untuk ekspor dan untuk dalam negeri.

Pada tahun 2014, terdapat 8 KEK baik di dalam maupun di luar Pulau Jawa yang sudah ditetapkan oleh Dewan KEK yang tertuang dalam RPJMN 2015-2019. KEK yang sudah ditetapkan di dalam maupun luar

Pulau Jawa adalah KEK Tanjung Lesung, KEK Sei Mangkei, KEK Tanjung Api-Api, KEK MBTK (Maloy Batuta Trans Kalimantan), KEK Palu, KEK Bitung, KEK Morotai dan KEK Mandalika. Kemudian pada tahun 2016 dan 2017, Dewan KEK Nasional menetapkan 3 (tiga) KEK lainnya, yaitu KEK Tanjung Kelayang, KEK Sorong dan KEK Lhokseumawe (Dewan Nasional Ekonomi Khusus, 2017). Akan tetapi, selama keberjalanan KEK yang telah ditetapkan oleh pemerintah, terdapat berbagai kendala yang mengakibatkan terhambatnya pembangunan maupun pengembangan KEK tersebut. Beberapa kendala yang dihadapi adalah masalah pembebasan lahan, ketersediaan energi, tata kelola, serta infrastruktur pendukung menuju kawasan KEK. Selain itu, untuk KEK yang bertemakan industri, permasalahan minimnya *supply* bahan baku menjadi salah satu permasalahan yang sering ditemui.

Munculnya berbagai permasalahan yang menghambat pembangunan dan pengembangan KEK tersebut mengharuskan KEK untuk dapat mencari cara mengatasinya. Selain itu, KEK yang sudah ada saat ini juga harus ditingkatkan daya saingnya mengingat kompetisi yang terjadi merupakan kompetisi antar kawasan secara global. Maksudnya KEK di Indonesia pada saat ini bukan lagi bersaing dengan kawasan lain di dalam negeri, akan tetapi bersaing dengan kawasan-kawasan ekonomi global lainnya di dunia, seperti Shenzen Special Economic Zone, Incheon Free Economic Zone, dan Penang SME Centre. Akibatnya pendekatan pengembangan KEK saat ini juga harus dinamis dan mengikuti arah perkembangan zaman yang saat ini berorientasi pada persaingan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) untuk menghasilkan inovasi-inovasi yang menjadi spesialisasi dari sebuah KEK di Indonesia.

Porter (1990) mendefinisikan daya saing nasional sebagai produktivitas yang secara prinsip merupakan kemampuan sebuah negara untuk berinovasi dan memperhatikan daya saing lebih pada tingkat wilayah. Berdasarkan cara pandang spasial, kontribusi utama daya saing lebih kepada sebuah pemahaman tingkat mikro yang menjelaskan daya saing perusahaan, seperti kapasitas untuk berinovasi dan mengaplikasikannya pada tingkat kawasan, yaitu kota, wilayah maupun negara (Porter, 2000). Daya saing wilayah dalam spasial direfleksikan secara utama untuk menarik investasi dan terdapat pertukaran informasi yang menghasilkan aglomerasi atau klaster dari perusahaan-perusahaan jasa dan industri. Agar KEK dapat berjalan lebih optimal, maka diperlukan penguatan secara internal dan eksternal sehingga tercipta keterkaitan antar klaster pada kawasan tersebut. Penguatan secara internal salah satunya melalui jejaring antar aktor dan inisiatif lokal sehingga menghasilkan difusi inovasi antar industri terkait yang beraglomerasi dalam sebuah klaster pada kawasan strategis skala nasional (Porter, 2008 dan Stimson, 2006). Pada proses difusi-inovasi tersebut terjadi pertukaran informasi maupun pengetahuan antar industri baik yang berada dalam satu

klaster yang sama maupun antar klaster dalam sebuah KEK.

Jejaring menjadi komponen yang membedakan antara pendekatan daya saing konvensional dengan pendekatan daya saing kontemporer (Nurrahma, 2016). Jejaring merupakan sesuatu yang penting karena dapat menjadi penghubung ke sumber informasi dan berperan dalam menghasilkan nilai tambah ekonomi akibat adanya tindakan kolektif yang terbentuk. Pada akhirnya penguatan sistem inovasi, yaitu penguatan suatu kesatuan (lembaga, SDM, suprastruktur dan infrastruktur) melalui jejaring antar aktor lokal dengan adanya proses interaksi yang menghasilkan penyebaran atau difusi inovasi di sebuah kawasan, seperti KEK menjadi sangat penting agar mampu bersaing dengan kawasan ekonomi global lainnya. Terkait dengan KEK di Indonesia, salah satu KEK yang saat ini sudah ditetapkan dan berjalan adalah KEK Sei Mangkei. Akan tetapi, saat ini pengembangan KEK Sei Mangkei masih terhambat karena adanya berbagai permasalahan, seperti masih belum efektifnya tata kelola di dalam KEK. Permasalahan tata kelola tersebut terjadi karena masih banyaknya aktor yang belum berperan secara optimal untuk mengembangkan KEK.

Jejaring antar aktor yang lemah baik pada KEK maupun dengan kawasan lainnya tersebut mengakibatkan kurangnya inovasi pada pengembangan sebuah wilayah. Daya saing KEK berdasarkan adanya jejaring aktor lokal, seperti Pemerintah, Intelektual atau Universitas, dan Pelaku Usaha dalam mengembangkan inovasi di sebuah wilayah menjadi sangat penting, terutama pada KEK yang berbasis industri, seperti KEK Sei Mangkei. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan jejaring antar aktor di KEK Sei Mangkei melalui pendekatan *triple helix*, mengingat jejaring sangat berperan dalam menghasilkan inovasi yang menjadi daya saing dari sebuah wilayah, dalam hal ini sebuah KEK. Guna menjawab tujuan tersebut, maka sasaran-sasaran dalam penelitian ini adalah: (1). Identifikasi peran aktor dalam pengembangan KEK Sei Mangkei; (2). Identifikasi hubungan jejaring antar aktor di dalam KEK Sei Mangkei.

II. METODE

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui secara mendalam mengenai hubungan jejaring antar aktor melalui pendekatan *triple helix* di KEK Sei Mangkei. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Metode kualitatif digunakan untuk mendapatkan data yang mendalam, yaitu data yang mengandung makna (Sugiyono, 2008) dari sebuah fenomena sosial dan masalah manusia (Creswell, 2013). Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus dalam menyelidiki secara cermat suatu fenomena atau peristiwa maupun proses, yaitu hubungan jejaring antar aktor di sebuah KEK melalui pendekatan *triple helix*.

A. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data pada penelitian ini terdiri dari data primer dan sekunder. Pengumpulan data primer dilakukan melalui wawancara tidak terstruktur dan *Focus Group Discussion* (FGD) terhadap aktor-aktor yang terlibat dalam pengembangan KEK Sei Mangkei. Sedangkan pengumpulan data sekunder dilakukan melalui studi literatur dan pengumpulan data dari instansi yang berkaitan.

B. Metode Analisis Data

Analisis isi atau *content analysis* merupakan metode analisis data yang digunakan pada penelitian ini. Analisis isi digunakan untuk memahami dan menginterpretasikan data yang terkandung pada saat FGD dan wawancara yang dilakukan dengan para aktor yang terlibat dalam pengembangan KEK Sei Mangkei. Interpretasi data dari hasil analisis isi kemudian dibandingkan dengan indikator hasil studi literatur yang telah dilakukan, yaitu terkait dengan kondisi ideal jejaring *triple helix* di berbagai kawasan ekonomi yang telah berhasil atau menjadi *best practices*, seperti salah satunya *Incheon Free Economic Zone* (IFEZ). Indikator tersebut menjadi penilaian untuk perbandingan antara kondisi ideal yang dijelaskan dalam tinjauan literatur mengenai pengembangan inovasi melalui penguatan jejaring *triple helix* yang menjadi *best practices* dengan kondisi yang ada di lapangan agar diketahui hubungan jejaring antar aktor di KEK.

III. TINJAUAN PUSTAKA

Pada berbagai negara, semakin aktif peran Universitas atau Intelektual dalam pengembangan wilayah yang menghubungkan dengan industri, otoritas publik dan masyarakat merupakan bentuk dari konsep *Quadruple Helix* dalam ekosistem inovasi wilayah. Konsep seperti kolaborasi penciptaan dan eksploitasi pengetahuan, eksplorasi peluang, dan pembangunan kapasitas telah menjadi *enabler* penting dalam sebuah inovasi (Markkula dan Kune, 2015). Sebagai *best practice*, *Incheon Free Economic Zone* atau IFEZ merupakan salah satu contoh dari kawasan ekonomi di Korea Selatan yang cukup berhasil dalam mengaplikasikan pendekatan *smart region*. Jejaring antar aktor lokal seperti pemerintah, baik pemerintah pusat maupun regional/ daerah, intelektual atau universitas, dan pelaku usaha sangat berperan dalam menciptakan nilai tambah dan inovasi pada kawasan ekonomi tersebut.

Jejaring antara pemerintah, intelektual/ universitas dan pelaku usaha yang terbentuk tersebut merupakan konsep "*triple helix*" yang menjadi bagian dalam pengembangan *smart region*. Adanya jejaring antara Pemerintah, Universitas dan Pelaku Usaha tersebut semakin menguatkan industri yang berbasis teknologi. Pemerintah Korea Selatan mendapatkan *share* yang

besar dari adanya sumberdaya teknologi dan informasi yang masuk kedalam industri manufaktur, jasa-jasa, retail serta penyewaan. Hal tersebut karena Korea Selatan telah berhasil menciptakan sistem inovasi yang mengaitkan antara tenaga kerja yang memiliki kemampuan dengan didukung oleh industri teknologi yang intensif. Selain itu, Pemerintah Korea Selatan juga menguatkan jejaring bisnis R&D atau penelitian dan pengembangan, mendukung perusahaan yang sedang berjalan, serta mengembangkan *Technopark* dan kawasan industrial teknologi tinggi.

Konsep *triple helix* tersebut sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Etzkowitz (2008) bahwa perkembangan inovasi di sebuah wilayah diciptakan dari adanya kolaborasi antara pemerintah, intelektual dan pelaku usaha. Setiap aktor yang terlibat idealnya memiliki hubungan yang erat dan saling menunjang dengan memanfaatkan *tools* teknologi informasi dan komunikasi sehingga dapat menjadi penggerak tumbuhnya industri di sebuah KEK. Ilmu pengetahuan yang dihasilkan oleh Intelektual atau Universitas menjadi informasi bagi aktor lainnya untuk mengembangkan dan menciptakan sebuah inovasi maupun kreativitas yang mampu meningkatkan nilai tambah pada industri pengolahan (Nurrahma, 2016). Interaksi yang tercipta antara intelektual dengan pelaku usaha tersebut menciptakan sebuah iklim bagi tumbuh dan berkembangnya inovasi dan kreativitas di sebuah kawasan. Iklim kolaborasi tersebut juga perlu didukung oleh pemerintah sebagai aktor yang bertanggung jawab terhadap regulasi dan kebijakan program pembangunan untuk menstimulus kinerja aktor Intelektual maupun Pelaku Usaha (Nurrahma, 2016).

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Identifikasi Peran Aktor dalam Pengembangan KEK Sei Mangkei

KEK Sei Mangkei ditetapkan melalui PP No. 29 Tahun 2012 pada tanggal 27 Februari 2012. KEK Sei Mangkei merupakan KEK pertama di Indonesia yang diresmikan operasionalnya pada tanggal 27 Januari 2015. KEK Sei Mangkei diusulkan oleh PT. Perkebunan Nusantara III (PTPN III) yang berlokasi di Kecamatan Bosar Maligas, Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara dengan luas wilayah sebesar 2.002,7 Ha. Kawasan ini memiliki bisnis utama industri pengolahan kelapa sawit dan karet. Selain itu, terdapat juga beberapa beberapa bisnis pendukung, seperti logistik, industri, elektronika, industri penunjang produksi, aneka industri, dan pariwisata. Produk-produk utama yang direncanakan akan dihasilkan diantara *fatty acid*, *fatty alcohol*, *surfactant*, *biodiesel* dan *biogas*.

Secara kelembagaan, KEK Sei Mangkei sudah memiliki Dewan Kawasan, Administrator KEK, serta Badan Usaha Pengelola KEK. KEK Sei Mangkei diajukan oleh Badan Usaha Pengelola yang berasal dari perusahaan BUMN, yaitu PT. Perkebunan

Nusantara (PTPN) III. Pengusulan tersebut telah mendapat persetujuan dari Pemerintah Kabupaten Simalungun dan diajukan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Utara kepada Dewan Nasional Kawasan Ekonomi. Saat ini PTPN III sebagai Badan Usaha Pembangun dan Pengelola juga telah membentuk anak perusahaan yang ditugaskan mengelola KEK Sei Mangkei, yaitu PT Kawasan Industri Nusantara atau KINRA (Dewan KEK, 2017). Berdasarkan PP No. 2 Tahun 2011 dan peraturan perubahannya, yaitu PP No. 100 Tahun 2012 tentang penyelenggaraan KEK, Badan Usaha pengusul sekaligus yang ditetapkan sebagai Badan Usaha Pengelola KEK, yaitu PTPN III, bertugas untuk menyelenggarakan kegiatan dan melaksanakan pengelolaan KEK.

Kemudian Dewan Kawasan yang terdiri dari Gubernur, Bupati atau Walikota, Aparat Pemerintah Provinsi dan Kabupaten yang bersangkutan memiliki tugas untuk melakukan pengawasan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan tugas Administrator KEK dalam penyelenggaraan sistem pelayanan terpadu satu pintu dan operasionalisasi KEK. Administrator KEK yang merupakan bagian dari Dewan Kawasan bertugas untuk melaksanakan pemberian izin usaha dan izin lain yang diperlukan bagi Pelaku Usaha yang mendirikan, menjalankan dan mengembangkan usaha di KEK serta melakukan pengawasan dan

pengendalian operasionalisasi KEK. Saat ini sudah hanya ada satu investor yang juga menjadi pelaku usaha di KEK Sei Mangkei, yaitu PT Unilever Oleochemical Indonesia.

Walaupun Dewan Kawasan dan Administrator KEK serta Badan Usaha Pengelola KEK Sei Mangkei sudah terbentuk, akan tetapi pelaksanaan kegiatan ekonomi di KEK masih belum berjalan secara maksimal. Hal tersebut disebabkan oleh adanya berbagai permasalahan dalam pengelolaan KEK, seperti kurangnya kontribusi Pemerintah Kabupaten, yaitu Kabupaten Simalungun dalam mendukung pembangunan KEK Sei Mangkei serta Badan Usaha, yaitu PTPN III yang terkesan hanya berpangku tangan pada upaya Pemerintah Pusat, terutama BKPM dalam pemasaran atau penarikan investasi kedalam KEK. Selain itu, PT. KINRA yang menjadi anak perusahaan yang diajukan oleh PTPN III untuk melaksanakan tanggung jawab selaku Badan Usaha KEK juga belum berfungsi secara efektif dalam mengelola KEK Sei Mangkei. Terkait dengan integrasi KEK dengan kawasan lainnya, seperti Kawasan Industri Kuala Tanjung, saat ini masih belum terdapat integrasi antara KEK Sei Mangkei dan KI Kuala Tanjung dalam menyelesaikan batas konsesi lahan pembangunan Pelabuhan Kuala Tanjung.

Tabel 1. Peran aktor yang terlibat dalam pengembangan KEK Sei Mangkei

Aktor	Peran	Permasalahan
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Dewan Nasional KEK 1. Ketua: Menko Perekonomian 2. Anggota: Menteri Keuangan; Menteri Perdagangan, Menteri Perindustrian, Menteri Dalam Negeri, Menteri PU & Perumahan, Menteri Perhubungan, Menteri Tenaga Kerja, Menteri Bappenas, Kepala BKPM 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Dewan Nasional KEK berperan dalam memberikan insentif baik fiskal (keringanan kepabeanan serta perpajakan) dan non fiskal (imigrasi, ketenagakerjaan, perizinan, pertanahan dan investasi) kepada KEK Sei Mangkei ▪ Pemasaran atau penarikan investasi kedalam KEK ▪ Penyediaan infrastruktur (seperti jalan) untuk menuju ke KEK 	Masih tingginya ketergantungan Badan Usaha terhadap Dewan Nasional KEK dalam penarikan investor serta permasalahan perizinan yang belum terintegrasi
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Dewan Kawasan 1. Ketua: Gubernur 2. Wakil Ketua : Bupati Simalungun 3. Anggota: Bupati Batubara, Kepala Kantor Wilayah Bea dan Cukai Provinsi Sumatera Utara, Kepala Kantor Pertanahan Simalungun, Kepala Kantor Imigrasi Medan, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Utara, Kepala Dinas 	Penyediaan infrastruktur di dalam kawasan (jalan, listrik, jaringan air bersih, jaringan limbah) dan energi	Masih kurangnya kontribusi Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan Pemerintah Kabupaten Simalungun karena ada kecenderungan kurangnya menjalankan komitmen untuk mengembangkan KEK Sei Mangkei, sehingga terkesan baik Pemerintah Provinsi Sumatera Utara maupun Pemerintah Kabupaten Simalungun hanya berpangku tangan dalam menjalankan tugas dan wewenang. Hal tersebut juga disebabkan oleh tidak meratanya tingkat pengetahuan dan

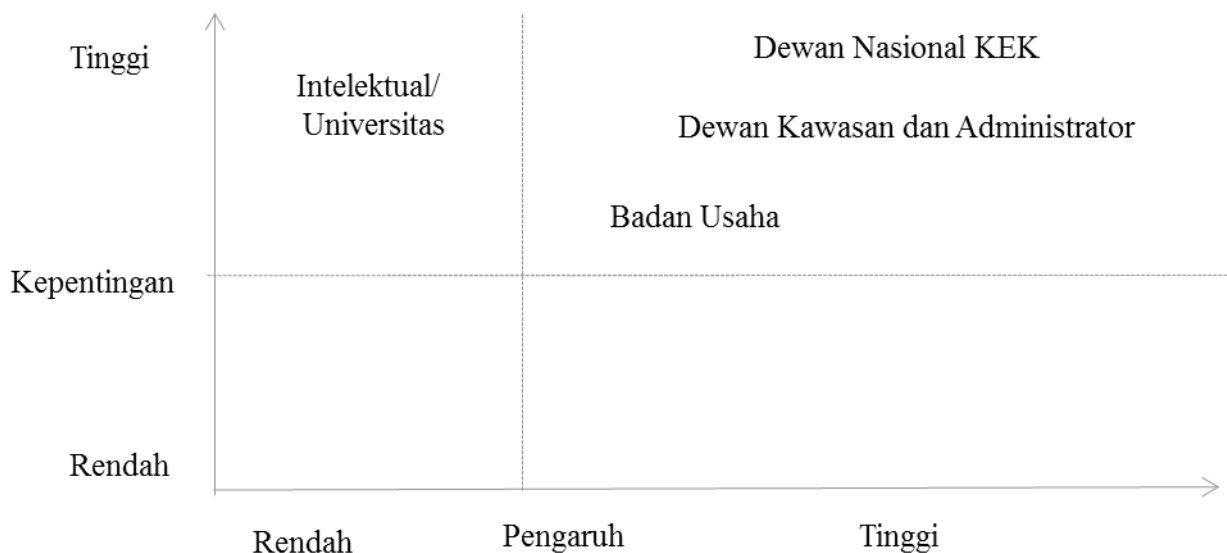
Aktor	Peran	Permasalahan
Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Utara, Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Provinsi Sumatera Utara, Kepala Badan Penanaman Modal dan Promosi Daerah Provinsi Sumatera Utara, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Simalungun		pendidikan SDM Aparatur pada kedua organisasi tersebut
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Administrator KEK PTSP Kabupaten Simalungun 	Memberikan pelayanan perizinan satu atap bagi Pelaku Usaha yang akan mendirikan, menjalankan dan mengembangkan usaha di dalam KEK Sei Mangkei	Masih terkendalanya masalah perizinan yang belum terintegrasi dengan Pemerintah Pusat
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Badan Usaha PTPN III, PT. KINRA 	Penyediaan dan pengelolaan infrastruktur di dalam kawasan, seperti jalan, listrik, jaringan air bersih, jaringan limbah, dan energi	Masih kurangnya peran Badan Usaha, yaitu PTPN III dalam menarik atau mempromosikan KEK Sei Mangkei ke investor dan terkesan berpangku tangan dengan memberikan kewenangan dan tugasnya kepada PT. KINRA sebagai anak perusahaan dari PTPN III
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pelaku Usaha PT Unilever Oleochemical Indonesia 	Melakukan kegiatan usaha di KEK Sei Mangkei	Pelaku usaha yaitu PT Unilever Oleochemical belum dapat bekerjasama dengan perguruan tinggi untuk mengembangkan industri hilirisasi kelapa sawit
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Perguruan Tinggi Universitas Sumatera Utara (USU), dll 	Peran Perguruan tinggi dalam mengembangkan KEK Sei Mangkei saat ini masih kurang. Belum ada transfer informasi dan teknologi dari hasil riset perguruan tinggi terkait dengan pengembangan hilirisasi kelapa sawit kepada KEK Sei Mangkei. Kerjasama perguruan tinggi dengan aktor lainnya, seperti Badan dan Pelaku di KEK Sei Mangkei juga masih kurang.	Perguruan tinggi sekitar belum dapat bekerjasama dengan Badan dan Pelaku Usaha di dalam KEK Sei Magkei untuk mengembangkan industri hilirisasi kelapa sawit

Sumber: Hasil Analisis, 2017

B. Identifikasi Hubungan Jejaring Antar Aktor di KEK Sei Mangkei

Berdasarkan identifikasi peran yang sudah dilakukan sebelumnya, terlihat bahwa Peran Pemerintah Pusat sangat mendominasi dalam pengembangan KEK Sei Mangkei jika dibandingkan dengan aktor lainnya. Kemudian Dewan Kawasan dan Administrator yang aktornya terdiri dari berbagai Aparatur Pemerintah Provinsi Sumatera Utara,

Kabupaten Simalungun, Kabupaten Batubara dan Kota Medan serta Badan Usaha (PTPN III) juga cukup berperan dalam mengembangkan KEK Sei Mangkei. Jika aktor-aktor tersebut dibuatkan kedalam sebuah kuadran pemetaan *stakeholder* pengelolaan KEK, maka akan masuk kedalam kuadran III, yaitu pemain yang merupakan kelompok *stakeholder* yang paling kritis karena kepentingan dan pengaruh yang tinggi (Febriano, Hariyadi, Falatehan, 2017).



Sumber: Hasil Analisis, 2017

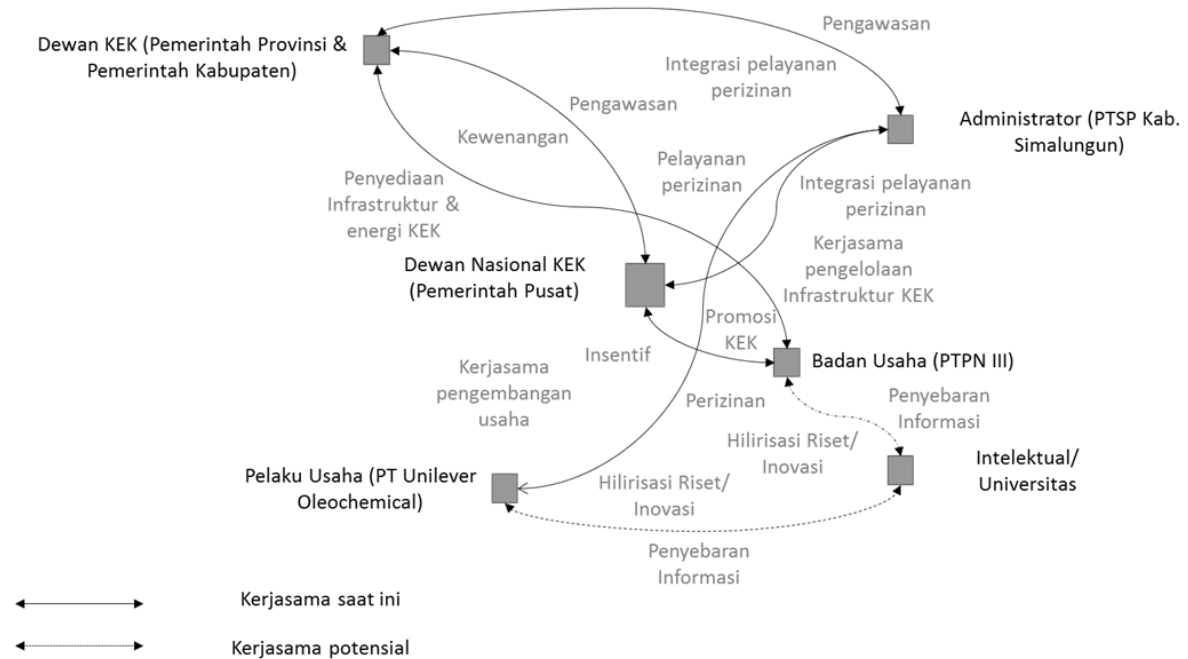
Gambar 1. Pengaruh dan kepentingan aktor-aktor dalam pengembangan KEK Sei Mangkei

Ketiga aktor yang terdiri dari Dewan Nasional, Dewan Kawasan dan Administrator serta Badan Usaha merupakan aktor kunci atau sebagai aktor utama yang memiliki peran sebagai regulator, manajemen penyelenggara (Administrator dan Badan Usaha), sebagai fasilitator dan evaluator dalam pengelolaan KEK Sei Mangkei (Febriano, Hariyadi dan Falatehan, 2017). Hal tersebut sesuai berdasarkan peraturan negara terkait kawasan ekonomi khusus yang diatur dalam Undang-Undang No. 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus dan Peraturan pemerintah Nomor 2 Tahun 2011 yang diubah menjadi Peraturan Pemerintah No. 100 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus. Akan tetapi berdasarkan Febriano, Hariyadi dan Falatehan (2017), terdapat 4 aktor lainnya yang berada pada kuadran II, yaitu stakeholder yang pada dasarnya memiliki kepentingan tinggi dalam keberlanjutan eksistensi KEK Sei Mangkei, akan tetapi pengaruh terhadap aktor lainnya tergolong rendah dalam pengelolaan KEK Sei Mangkei. Keempat aktor tersebut adalah Universitas/ Perguruan Tinggi/ Lembaga Penelitian, LSM, Masyarakat Sekitar dan Konsumen. **Gambar 1** merupakan gambaran pengaruh dan kepentingan aktor-aktor dalam pengembangan KEK Sei Mangkei.

Kemudian jika dikaitkan dengan hubungan antar aktor, adanya tingkat kepentingan dan pengaruh tersebut maka berkaitan dengan hubungan jejaring antar aktor yang terbentuk. Hal tersebut dapat dilihat dari peran Pemerintah Pusat atau Dewan Nasional

KEK yang masih mendominasi dalam pengembangan KEK. Kemudian Dewan Nasional KEK memberikan sebagian kewenangannya kepada Dewan Kawasan untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan KEK yang dilakukan oleh penyelenggara KEK, yaitu Administrator dan Badan Usaha. Dewan Kawasan juga bertanggung jawab kepada Dewan Nasional KEK untuk melaporkan kegiatan KEK yang sudah dilakukan tersebut. Dewan Nasional memberikan kemudahan atau insentif baik fiskal maupun non fiskal kepada Badan Usaha dalam menyelenggarakan KEK kepada Badan Usaha sebagai penyelenggara KEK. Kemudian Dewan Kawasan bekerjasama dengan Badan Usaha dalam menyediakan infrastruktur.

Administrator (PTSP Kabupaten Simalungun) yang merupakan bagian dari Dewan Kawasan bekerjasama dengan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi Sumatera Utara dalam memberikan pelayanan perizinan satu atap untuk Pelaku Usaha yang akan membangun dan mengembangkan kegiatan usaha di dalam KEK. Sedangkan saat ini Intelktual atau Universitas masih kurang bekerjasama dengan aktor lainnya, baik itu Badan Usaha maupun Pelaku Usaha, sehingga kegiatan usaha yang dilakukan di dalam KEK masih bersifat *business as usual* yang pada akhirnya inovasi baik dalam pengelolaan KEK maupun inovasi model bisnis hilirisasi kelapa sawit masih sangat kurang. **Gambar 2** merupakan gambaran hubungan jejaring antar aktor dalam pengembangan KEK Sei Mangkei.



Sumber: Hasil Analisis, 2017

Gambar 2. Jejaring antar aktor dalam pengembangan KEK Sei Mangkei

V. KESIMPULAN

Jejaring merupakan kunci utama dalam pengembangan daya saing wilayah di sebuah kawasan. Konsep *triple helix* yang merupakan interaksi antara pemerintah – intelektual atau universitas – pelaku usaha menjadi salah satu pendekatan untuk menciptakan sistem inovasi baik dari tata kelola maupun model bisnis di sebuah kawasan, seperti Kawasan Ekonomi Khusus. Adanya sinergi dari berbagai aktor tersebut sehingga diharapkan dapat memicu terjadinya sirkulasi ilmu pengetahuan yang akhirnya berujung pada penciptaan inovasi (Etzkowitz, 2008 dalam Nurrahma, 2016). Akan tetapi, kondisi interaksi yang terjadi di KEK Sei Mangkei masih banyak dipengaruhi oleh Dewan KEK Nasional (Pemerintah Pusat) yang masih berperan sebagai aktor utama dalam pengembangan KEK.

Adanya hubungan ketergantungan terhadap sebuah sumber daya tersebut mengakibatkan tidak munculnya inovasi di sebuah kawasan (Etzkowitz, 2011), seperti KEK. Sinergi antar aktor pada konsep *triple helix* akan tercipta apabila masing-masing aktor mampu memainkan peranannya masing-masing tanpa adanya ketergantungan dengan aktor lain. Hal tersebut mengindikasikan bahwa konsep *triple helix* membutuhkan jejaring yang lebih luas dalam sebuah kawasan untuk menutupi kekosongan peran antar aktor yang sudah terjadi (Nurrahma, 2016). Pada KEK Sei Mangkei, universitas atau intelektual belum dapat memainkan perannya dalam memberikan transfer informasi maupun pengetahuan, seperti hilirisasi riset terkait pengembangan industri kelapa sawit maupun sistem logistik kepada aktor lainnya,

terutama Badan dan Pelaku Usaha. Akibatnya saat ini KEK Sei Mangkei masih menjalankan kegiatan usahanya secara *business as usual* karena tidak adanya inovasi dalam kegiatan usaha tersebut.

Tidak mampunya aktor-aktor untuk berjejaring di sebuah kawasan juga dipengaruhi oleh adanya sifat kepemimpinan (*leadership*) yang didalamnya terdapat karakteristik kolaboratif. Berdasarkan konsep yang dikemukakan oleh Stimson (2009), sifat kepemimpinan yang kuat dibutuhkan agar dapat mendorong interaksi antar aktor di sebuah kawasan. Dewan KEK Nasional sebagai aktor kunci saat ini belum mampu membentuk tindakan bersama dan juga belum mampu untuk mempengaruhi aktor lain dalam membentuk jejaring. Akhirnya pada saat ini masih terdapat adanya saling ketergantungan antara aktor yang satu dengan aktor yang lainnya, terutama Badan Usaha dengan Dewan KEK Nasional. Selain itu, saat ini juga masih terdapat kurangnya interaksi yang sinergis antara Dewan Kawasan serta Administrator sebagai penyelenggara KEK sehingga mengakibatkan kurangnya kontribusi aktor-aktor tersebut dalam mengembangkan KEK Sei Mangkei.

Selain itu, kondisi atau iklim politik juga mempengaruhi pengembangan KEK. Kepemimpinan kolaboratif yang didukung dengan adanya sinkronisasi kebijakan antara rencana pengembangan KEK sebelumnya dengan rencana pengembangan KEK saat ini menjadi salah satu kunci dalam mengembangkan KEK di Indonesia. KEK bukan hanya dijadikan sebagai *branding* promosi politik atau kampanye oleh pemerintah, sehingga pengembangan KEK bisa lebih menguatkan jejaring *triple helix* dan

mengurangi ketergantungan aktor-aktor lainnya terhadap pemerintah pusat.

DAFTAR PUSTAKA

Artikel jurnal:

- [1] Etzkowitz, H. *Silicon Valley: The Sustainability of Innovation – Region*. Presented at the “Commercialising University Research Workshop”, University of London Birkbeck, Center for Innovation, 23 – 24 Oct. 2011.
- [2] Febriano, Riza Muhammad; Hariyadi, A. Faroby Falatehan. *Strategi Pengelolaan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sei Mangke, Klaster Industri Hilir Kelapa Sawit Terintegrasi dan Berkelanjutan*. *Agrica* (Jurnal Agribisnis Sumatera Utara) Vol. 10 No. 1/ April 2017. Available online: <http://ojs.uma.ac.id/index.php/agrica>.
- [3] Markkula, Markku and Hank Kune. *Making Smart regions Smarter: Smart Specialization and the Role of Universities in Regional Innovation Ecosystems*. *Technology Innovation Management Review* October 2015 (Volume 5, Issue 10).

Buku:

- [1] Creswell, John W. *Research Design :Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. California: SAGE publications, 2013.
- [2] Etzkowitz, H. *The Triple Helix: University – Industri – Government Innovation in Action*. London: Routledge, 2008
- [3] Porter, Michael E. *Clusters and The New Economic of Competition*. *Harvard Business Review* November – Desember, hal. 77-90, 1999.
- [4] Rogers, Everett M. *Diffusion of Innovation*. New York: The Free Press – A Division of Macmillan Publishing Co., Inc, 1983.
- [5] Stimson, Robert; Stough, Roger R.; dan Brian Roberts. *Regional Economic Development: Analysis and Planning Strategy*. Berlin: Springer, 2006.
- [6] Stimson, Robert; Stough, Roger R.; dan Salazar, Maria. *Leadership and Institutions in Regional Endogenous Development*. UK: Edward Elgar Publishing Limited, 2009.
- [7] Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2008.

Tesis:

- [1] Nurrahma, Vaulli. 2016. *Kontribusi Jejaring Aktor dalam Pengembangan Industri Kreatif di Kota Cimahi*. Tesis. Bandung: SAPPK ITB.

Internet:

- [1] kek.go.id

BIODATA PENULIS

Penulis merupakan Dosen di Program Studi Sarjana Perencanaan Wilayah dan Kota Universitas Komputer Indonesia.